

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Masalah**

Pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, sehingga diharapkan peningkatan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki.

Todaro (2006) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keanekaragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual.

Sukirno (2006) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada atau tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, peningkatan dalam pendapatan serta kemakmuran masyarakat.

Sejak diberlakukan otonomi daerah, terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000). Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus-menerus untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Adanya

perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut pihak pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi daerah.

Pada era otonomi daerah paradigma baru dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima. Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materil dan non materil. Untuk mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Paser diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sisi pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah dan Dilihat dari sisi produksi PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*). Perhitungan PDRB melalui

pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 2008). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser disumbang oleh 9 (sembilan) sektor yaitu: pertanian; pertambangan dan penggalan; industri; listrik dan air minum; bangunan; perdagangan; angkutan dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan lainnya; jasa-jasa. Di bawah ini tabel peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Paser selama 2008 - 2013.

Tabel 1.1 Nilai PDRB Menurut Harga Berlaku 2009-2013 (dalam Jutaan Rupiah)

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011<sup>r)</sup></b>	<b>2012<sup>*</sup></b>	<b>2013<sup>**)</sup></b>
Pertanian	1.522.538	1.671.646	1.921.480	2.073.153	2.283.514
Pertambangan dan Penggalan	7.181.386	10.086.581	12.917.131	13.691.208	14.465.664
Industri	105.573	113.884	134.522	141.138	154.371
Listrik, gas, dan air bersih	15.551	17.038	20.463	23.449	26.679
Konstruksi	238.773	268.921	298.738	328.014	412.941
Perdagangan	409.189	474.009	546.134	646.198	756.326
Transportasi dan Komunikasi	71612	80817	89921	103396	114950
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	103.941	119.761	139.639	157.484	170.423
Jasa-Jasa	323.649	374.512	448.355	489.530	567.875
<b>Jumlah</b>	<b>9.972.212</b>	<b>13.207.170</b>	<b>13.207.170</b>	<b>17.653.909</b>	<b>18.952.743</b>

Sumber :BPS Kabupaten Paser, 2014

\*\*<sup>)</sup>Angka sangat sementara; \*<sup>)</sup>angka sementara <sup>r)</sup>angka revisi

Dalam tabel 1.1 dapat di lihat bahwa perekonomian di Kabupaten Paser pada tahun 2013 sangat bervariasi. Sektor-sektor yang dominan seperti sektor pertambangan dan penggalan sebesar 14.465.664 juta rupiah, pertanian sebesar 2.283.514 juta rupiah, perdagangan sebesar 756.326 juta rupiah dan jasa sebesar

567.875 juta rupiah cukup besar pengaruhnya apalagi sektor pertambangan dan penggalian yang tiap tahunnya mengalami kenaikan yang tinggi ketimbang sektor pertanian, dan sektor lain. Maka dari itu sektor pertambangan dan penggalian yang paling banyak memberikan kontribusinya untuk perekonomian di wilayah Kabupaten Paser dibandingkan sektor lainnya.

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi maka semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi tersebut. Guna merencanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang baik perlu diketahui potensi ekonomi dari suatu daerah dan menentukan prioritas pada sektor-sektor yang sesuai dengan kemampuan dan potensi sumber daya daerah, karena pada prinsipnya perekonomian daerah terdiri dari dua sektor yaitu sektor-sektor yang mempunyai keunggulan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam porsi yang besar terhadap proporsi ekspor barang dan jasa ke daerah lain dan sektor-sektor yang menyediakan barang dan jasa hanya terbatas pada kebutuhan daerah itu sendiri (Adisasmita, 2008).

Mengingat bahwa sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Paser, tentunya dibutuhkan kondisi atau iklim usaha yang sehat dan kondusif, serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan sektor tersebut di wilayah Kabupaten Paser. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan tentang potensi yang ada di Kabupaten Paser.

Sektor-sektor tersebut dapat dijadikan dan diwujudkan sebagai sektor unggulan/andalan baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional, sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. Dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, perlu diadakan suatu identifikasi dan analisis tentang kondisi dan potensi sektor ekonomi menurut lapangan usaha untuk dimanfaatkan dalam mencari dan menciptakan sektor unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar lokal, regional dan bahkan internasional, sehingga sektor unggulan tersebut dapat berubah dari yang semula bersifat keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keunggulan kompetitif/bersaing (*competitive advantage*). Komoditi-komoditi unggulan daerah tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah menuju kemandirian daerah maupun dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan dengan adanya pemekaran wilayah yang berimbas pada berkurangnya luasan wilayah termasuk juga sumber daya alamnya, dinilai perlu untuk diketahui apakah terjadi perubahan-perubahan dominasi dari sektor-sektor lapangan usaha dalam struktur perekonomian Kabupaten Paser apabila diperbandingkan struktur perekonomian sebelum pemekaran wilayah (otonomi daerah) dengan struktur perekonomian sesudah pemekaran wilayah.

Maka dari itu pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana pengaruhterjadinya perubahan infrastruktur ekonomi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengetahuinya pemerintah harus melakukan analisis terhadap potensi ekonomi yang terjadi di daerah dengan membandingkannya dengan

daerah yang lebih besar. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Potensi Ekonomi di Kabupaten Paser Periode Tahun 2008 – 2013”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Paser?
- 2) Seberapa besar peranan sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser
- 3) Bagaimana pergeseran sektor-sektor ekonomi dilihat dari kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Paser?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengidentifikasi sektor unggulan Kabupaten Paser
- 2) Untuk mengidentifikasi besarnya peranan sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser
- 3) Untuk menganalisis pergeseran sektor-sektor ekonomi dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Paser tahun 2008-2013.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis penelitian ini merupakan penerapan dari teori-teori akademis yang telah diperoleh selama di Perguruan tinggi, sekaligus sebagai tolak ukur pribadi tentang keilmuan yang diterima selama ini, dan juga sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Membantu memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan terhadap penelitian yang pernah dilakukan.
3. Diharapkan menjadi tambahan informasi sekaligus bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya.